



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Nabhansyah, S.Hut

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. Nafarin, MP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ir. H. Nafarin, MP
NIP 19620513 198903 1 011

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERIZINAN
INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Akhmad Nabhansyah, S.Hut
NIP.19671020 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	A (88.25)
		Persentase Permohonan yang dilayani	100%
		Persentase Usaha berizin	90%

Program Pelayanan Penanaman Modal

- 1 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Rp 254.219.900

Banjarbaru, Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Ir. H. Nafarin, MP
 NIP 19620513 198903 1 011

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERIZINAN
INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Akhmad Nabhansyah, S.Hut
 NIP.19671020 199403 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : **Analisis Kebijakan Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial**
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Akhmad Nabhansyah, S.Hut**
Jabatan : **Kepala Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial**
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

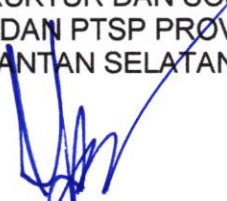
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERIZINAN
INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
DINAS PM DAN PTSP PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

Pihak Pertama,
ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG PERIZINAN
INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Akhmad Nabhansyah, S.Hut
NIP.19671020 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial	1. Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100 %
		2. Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dilayani	145 Jenis izin

Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

- | | | |
|--|----|-------------|
| 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Rp | 254.219.900 |
|--|----|-------------|

Banjarbaru, 02 Januari 2022

KEPALA BIDANG PERIZINAN INFRASTRUKTUR
DAN SOSIAL DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PERIZINAN
INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Akhmad Nabhansyah, S.Hut
NIP.19671020 199403 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Qadariah, SH, M.Si
Jabatan : Analis Kebijakan Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Akhmad Nabhansyah, S.Hut
Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERIZINAN
INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
DINAS PM DAN PTSP PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

Akhmad Nabhansyah, S.Hut
NIP.19671020 199403 1 010

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PERIZINAN
INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL DINAS
PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Lailatul Qadariah, SH, M.Si
NIP.19750220 200903 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur	1. Persentase Pemunahan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100 %
		2. Jumlah jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dilayani	35 Jenis izin

Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

- | | | |
|--|----|-------------|
| 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Rp | 118.000.000 |
|--|----|-------------|

Banjarbaru,

KEPALA BIDANG PERIZINAN INFRASTRUKTUR
DAN SOSIAL DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Akhmad Nabhansyah, S.Hut
NIP.19671020 199403 1 010

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PERIZINAN
INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Lailatul Qadariah, SH, M.Si
NIP.19750220 200903 2 003



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Mahrita, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. Nafarin, MP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru,

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ir. H. Nafarin, MP

NIP 19620513 198903 1 011

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGADUAN,
KEBIJAKAN DAN INFORMASI
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Hj. Mahrita, S.Sos, MM

NIP.19730517 199203 2 003

PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Pengaduan dan Informasi	Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) Pengaduan	A (88.25)

Program / Kegiatan		Anggaran
<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>		
1	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp 655.334.600
<i>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>		
2	Pengelolaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 212.545.800

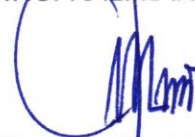
Banjarbaru, 02 Januari 2022

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS PM DAN PTSP
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Ir. H. Nafarin, MP
 NIP 19620513 198903 1 011

Pihak Pertama,
 BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN
 INFORMASI DINAS PM DAN PTSP
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Hj. Mahrita, S.Sos, MM
 NIP.19730517 199203 2 003



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.Zaini Miftah, ST

Jabatan : Analis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj Mahrita,, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADUAN,
KEBIJAKAN DAN INFORMASI
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Hj. Mahrita, S.Sos, MM
NIP.19730517 199203 2 003

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG
PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN
INFORMASI DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A.Zaini Miftah, ST
NIP.19710614 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang berjalan dengan lancar dan data Informasi yang Update	2 Sistem

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	<p>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	Rp 212.545.800

Banjarbaru, 02 Januari 2022

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN INFORMASI DINAS PM DAN PTSP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Hj. Mahrita S.Sos, MM
 NIP.19730517 199203 2 003

ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN INFORMASI DINAS PM DAN PTSP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



A.Zaini Miftah, ST
 NIP. 19710614 200604 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rasyi Hamdi, SH

Jabatan : Analisis Kebijakan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj Mahrita,, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGADUAN,
KEBIJAKAN DAN INFORMASI
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Hj. Mahrita, S.Sos, MM

NIP.19730517 199203 2 003

Pihak Pertama,
ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG
PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN
INFORMASI DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Rasyi Hamdi, SH

NIP.19750619 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Pelayanan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Investor	100%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<i>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>	
1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 549.624.600
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp 18.423.800
3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp 87.286.200

Banjarbaru, Januari 2022

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN
INFORMASI DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Hj. Mahrita, S.Sos, MM
NIP.19730517 199203 2 003

ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG
PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN INFORMASI
DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Rasyi Hamdi, SH
NIP. 19750619 200012 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Miftahul Chair, ST, MT

Jabatan : Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Dinas PM dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. Nafarin, MP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 02 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PM DAN PTSP

Ir. H. Nafarin, MP
NIP 19620513 198903 1 011

Pihak Pertama,
BIDANG PERIZINAN EKONOMI DAN
SUMBER DAYA ALAM
DINAS PM DAN PTSP

Ir. Miftahul Chair, ST, MT
NIP.19680929 199803 1 010